

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN,
KABUPATEN PESAWARAN**

(SKRIPSI)

AZIZA NOVIRANIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh :

AZIZA NOVIRANIA

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terlepas dari faktor keuangan sebagai pendukung pembiayaan, aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan aplikasi sistem keuangan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan model implementasi kebijakan George C Edward III. Pengelolaan keuangan desa seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desa menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan pembayaran, pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa juga masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh para pelaksana program, serta kelemahan pada aplikasi yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.

Kata Kunci: Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VISUAL FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN BOGOREJO, GEDONG TATAAN, PESAWARAN

By:

AZIZA NOVIRANIA

The implementation of village governance will not be separated from financial factors as financial supporters, the application of the village financial system is developed for the management of village funds in order to facilitate financial reporting becomes more transparent and accountable. The purpose of this study is to determine the implementation of financial system application policy in Bogorejo Village Gedong Tataan Sub District Pesawaran. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis using policy implementation model George C Edward III. Management of village finances should be, this application of village finance becomes more accountable. The results of this study indicate that the implementation of village financial system applications in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been running quite well. Implementation of the village financial system application becomes more patterned and well structured because each fund issued must be marked with a letter of payment request, the implementation of the village financial system application is also still found a weakness in communication indicators are transmitted by BPKP considered less maximal by the program implementers, as well as weaknesses in applications that are susceptible to viruses and these applications are not yet online so they are not directly connected to the district government.

Keywords: Implementation of Village Financial System Application

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN,
KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh:

AZIZA NOVIRANIA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN
GEDONG TATAAN, KABUPATEN
PESAWARAN**

Nama Mahasiswa

: Aziza Novirania

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1416021022

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

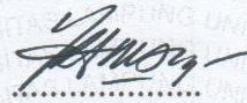
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

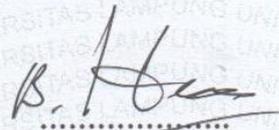
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

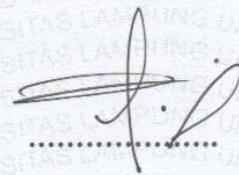
Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Sekretaris : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



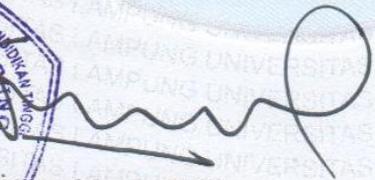
Penguji : Drs. Ismono Hadi, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590603 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Maret 2018

PERNYATAAN

Dengan karya ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Maret 2018



Aziza Novirania
NPM. 1416021022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aziza Novirania, dilahirkan di Bandar Lampung pada 06 November 1996. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, putri dari Bapak H. Surya M. Yus dan Dra. Hj. Nilawati. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di TK Pratama Bandar Lampung, dilanjutkan di SDN 1 Kali Balau Kencana Bandar Lampung pada tahun 2002-2008.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun 2011-2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2014.

Selama masa perkuliahan penulis pernah berhimpun dalam beberapa organisasi. Penulis pernah menjadi Anggota Muda LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2014-2016, menjadi Anggota Biro 3 HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2015-2016, menjadi Anggota Biasa di LSSP Cendekia FISIP Unila dan Sekertaris Umum LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2016-2017. Penulis telah melaksanakan Kuliah

Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS Al-Baqarah: 286)

“Janganlah engkau berputus asa karena putus asa itu bukanlah akhlak seorang muslim. Ketahuilah bahwa kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin dan impian hari ini adalah kenyataan hari esok”
(Imam Hassan Al-Banna)

“Karena rezeki telah dibagi dan urusan telah diatur, maka jangan pernah bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan”
(Aziza Novirania)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikantepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Papa dan Mama tercinta serta kakak-kakakku dan adikku yang ku sayangi sebagai
tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Mama dan Papa tercinta, H. Surya M. Yus dan Dra. Hj. Nilawati terimakasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan tanpa henti, sehingga skripsi ini dapat selesai dan menjadi kebanggaan untuk mama dan papa, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Mama dan Papa.

2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus pembimbing utama untuk penulis. Terima kasih ilmu, semangat, motivasi dan kesabaran serta rasa pengertian sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku pembimbing kedua. Terimakasih atas kesabaran dalam memberikan masukan dan saran kepada penulis demi terciptanya skripsi ini. Terimakasih segala motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu dan waktu yang diberikan kepada penulis selama masa belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kakak dan adik kandung penulis, Yunda Ayes, Bung Ivan, Koko Doni dan Adik tercinta Adik Angga serta kakak ipar penulis, Indra Adam, Ikutan Selvi, Pujian Rizka dan empat orang keponakan penulis, Kakak Ecil, Ses Naomi, Abang Arsen dan Adek Aiyra. Terima kasih atas segala doa, keceriaan, semangat dan kasih sayang yang diberikan sehingga rasa lelah penulis menjadi bahagia ketika melihat kalian semua.

8. Sahabatku tersayang, Iranda Putri, S.IP terimakasih atas segala kenangan dan kebahagiaan serta kesabaran menghadapi penulis. Terima kasih sudah hadir di kehidupan penulis sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga kamu wisuda duluan. Terima kasih untuk motivasi dan waktu yang selalu diluangkan kepada penulis ketika penulis galau maupun penulis butuh makanan dan hiburan. Semoga ngaret dan hobi nonton sinetronmu dikurengin agar hidupmu tidak penuh dengan drama.
9. Sahabatku, Abangku M. Dhian Bagus Aprian dan M Dhean Pratama. Terima kasih atas segala kenangan, kebahagiaan, kasih sayang dan tebengan serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu sabar menghadapi penulis yang sering marah-marah gak jelas. Terimakasih atas waktu yang selalu diberikan kepada penulis. Semangat mengejar wisuda gus, de kutunggu kalian memakai toga.
10. Teman-teman Pance yang sekarang kembali bersatu dan tetap pance. Nosi Marisa, Shinta Silvia Novianna, M. Wiryawan Saputra, Dhian Kurniawan. Terimakasih atas kebahagiaan dan waktu yang sangat berarti bagi penulis, terima kasih atas candaan dan kasih sayang selama ini, semoga kita tetap seperti ini sampai nanti saling kirim undangan yaa.
11. Kgs. Faisal Fathurrahman, terima kasih atas segala waktu, kesabaran, motivasi dan keceriaan kepada penulis selama ini. Terimakasih selalu menjadi sahabat dan pemberi motivasi yang baik kepada penulis. Semangat kuliah cal biar cepet skripsian.

12. Aldin Muharrom, terima kasih telah meluangkan waktu dan kesabarannya menemani penulis melakukan penelitian. Terima kasih di, semangat skripsi semoga selalu diberikan kemudahan.
13. terima kasih banyak kepada Gilang yang selalu ada untuk penulis. Terima kasih selalu meluangkan waktu untuk penulis. Terima kasih untuk candaan dan kebahagiaan selama ini, selalu mendengarkan keluh kesah penulis tanpa mengenal lelah. Selalu sabar menghadapi marah-marah dan rasa bete penulis. Semangat dan terus berhijrah untuk menjadi lebih baik. Semangat kuliahnya bosku!
14. Abang-abang dan mba-mba di jurusan Ilmu Pemerintahan,, Yogi Noviantama, S.IP., Rifky Febrihanuddin, S.IP, Danang Marhaens, S.IP., Danni Pangriwibo, S.IP, Restiani Damayanti, S.IP, Putri Apriodhite, S.IP., Kenn Sindy, S.IP., Fina Ria Tisa, S.IP terima kasih pernah dan selalu direpotkan penulis, sejak kapita hingga skripsi. Terima kasih atas ilmu dan motivasi serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis
15. Adik-adik 2015 yang selalu mengemaskan Lisda, Ifa, Aca, Elen, Dara, Putri, Meisandra, Riyo, Fadel. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dikampus. Terimakasih atas candaan dan kebahagiaan selama ini. Semangat kapita dek, kalian pasti bisa.
16. LSSP Cendekiaku Presidiumku, Elyta, Fauziah, Panji, Zio, Nila, Lisda, Rissa, Rahmi, Ifa, Putri terima kasih atas pengalaman, ilmu dan pelajaran yang diberikan kita masih menjabat menjadi presidium. Terima kasih banyak berkat cende penulis dapat belajar berorganisasi dan meluangkan waktu dengan baik untuk sesuatu yang sangat bermanfaat.

17. Sahabatku, Lonely yang sebenarnya tidak lonely. Nurul Erdawaty, Dea Ayu Permata Gunawan, Israni Wedi Kurniati, M Reza Pahlevi, M Pandu Wijaya, M Satria Pratama. Terima kasih atas candaan dan kebahagiaan, semangat mengejar sarjana genk (kecuali satria yaa, sering-sering pulang sat biar sering ditraktir *wkwk*)
18. Sahabat sejak SMA yang selalu setia menjadi sahabat penulis sampai saat ini Nurul, Nur, Santi, Roy, Dennis, Cholid. Terimakasih atas waktu dan kebahagiaannya selama ini. Sering-sering kumpul *genk*, aku rindu.
19. Teman hidup penulis selama 40 hari KKN, Piesta Prima Beta Pairul, S.Ked., Siti Nur Azizah, S.Ikom., Natasya Hayatillah, S.Ked., Dian Rusadi, S.Si., Muhammad Zaim Rozaan, S.Hub.Int, Muhammad Rizki Arrizal, S.T. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang baik bagi penulis, terima kasih atas candaan dan kebahagiaan selama ini. Semoga silaturahmi dan kekompakan kita tetap terjalin. Sering-sering jenguk bude *guys* Punggur dekat ini.

20. Terakhir, teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2014, Dita, Gita, Fatia, Nyunyun, Asfhira, Mike, Debby, Elvina, Mega, Ana, Dhian, Bella, Depoy, Umaya, Miss, Silvi, Icha, SintaPP, Nia, Elyta, Intan, Meri, Mitha, Abu, Redhi, Madon, Ikhsan, Billy, Safta, Komang, Bayu, Ujang, Iqbal, Andri, Shohib, Double Wahyu, Yudi, Sandi, Yoga, Ridho, Ndo, Brili, Aldi, Ezio, Indra, Fedry, Ferdian, Adit, Panji dan teman-teman lain mohon maaf tidak bisa tulis semua. Terima kasih atas segala kenangan dan kasih sayang selama masa berjuang selama kurang lebih 4 tahun ini.

Bandar Lampung, 20 Maret 2018

Aziza Novirania

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan	11
1. Implementasi Kebijakan	11
2. Model Implementasi Kebijakan.....	13
a. Model Merilee S. Grindlee	14
b. Model George C. Edward III	14
c. Model Donald S. Van Meter dan Van Horn	23
d. Model Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn	25
e. Model Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier	25
B. Tinjauan Mengenai Desa.....	27
C. Tinjauan Mengenai Sistem Keuangan Desa.....	28
1. Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	28
2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa	30
3. Fitur-Fitur Sistem Keuangan Desa	30
4. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa	31
D. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Informan	40
D. Jenis Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara	43
2. Observasi	44

3.	Dokumentasi	45
F.	Teknik Pengolahan Data	46
1.	Editing Data	46
2.	Interpretasi Data.....	47
G.	Teknik Analisis Data	48
1.	Reduksi Data.....	48
2.	Penyajian Data	49
3.	Verifikasi Data.....	50
H.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	54
A.	Gambaran Lokasi Penelitian	54
B.	Sejarah Singkat Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	55
C.	Monografi Desa Bogorejo	56
1.	Geografi	56
2.	Jumlah Penduduk	56
3.	Kondisi Sosial	56
D.	Struktur Pemerintahan	58
E.	Potensi Desa	58
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A.	Komunikasi	61
B.	Sumber Daya	66
1.	Sumber Daya Manusia	67
2.	Sumber Daya Non Manusia.....	70
C.	Disposisi	72
D.	Stuktur Birokrasi	78
E.	Perbedaan Sebelum dan Sesudah adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa	81
F.	Triangulasi Sumber	83
VI.	SIMPULAN	95
A.	Simpulan	95
B.	Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2. Informan	41
Tabel 3: Perbedaan Sebelum dan Sesudah adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa.....	83
Tabel 3. Triangulasi Data Penelitian	85

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
Gambar 1. Faktor Utama Implementasi Kebijakan	12
Gambar 2. Model George Edward III 1980	22
Gambar 3. Model Van Meter dan Van Horn	24
Gambar 5. Kerangka Pikir	35
Gambar 6. Struktur Birokrasi	58
Gambar 7. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Serta Penyampaian Informasi	63
Gambar 8. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kebijakan Aplikasi SISKEUDES.....	64
Gambar 9. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kebijakan Aplikasi SISKEUDES.....	65

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci.

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. (Hanifah dan Praptoyo dalam *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*, 2015)

Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa, selain Dana Desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa

agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

Kenyataan yang terjadi saat ini terkait Pengelolaan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa ini, antara lain:

(1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya *skill* (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*, 2015)

Faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Pihak aparatur desa kurang mempublikasikan tentang keuangan desa kepada masyarakat, mempublikasikan melalui papan pengumuman, tidak hanya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BP). Bagi Kepala Desa hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan *job description* yang ada. (Rahmawati dkk dalam Jurnal *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2015)

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabilitas.

Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. *Launching* aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk.

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Aplikasi sistem keuangan desa pada pelaksanaannya masih sarat akan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala dalam memasukan data. Hal ini diperkuat dengan fakta dilapangan yang dimuat dalam harian harapanrakyat.com, yakni:

“Salah seorang Kepala Desa asal Kecamatan Pangandaran Herdianto mengatakan, bahwa penerapan Siskedes dirasa belum tepat. Selain menimbulkan kebingungan pada penerapannya, seolah-olah sistem tersebut juga terkesan dipaksakan. “Sistem aplikasi keuangan tersebut nantinya akan masuk ke *server*. Jika salah memasukan data, maka tidak sulit merubahnya. Maka dari itu kita masih menggunakan secara manual. Pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan,” tegas sumber Koran HR, Senin (09/01/2017) lalu.

Menurutnya, semua tenaga operator hampir secara keseluruhan mengalami kendala dalam proses memasukan data, karena belum paham. Selain itu, lanjutnya, landasan hukum sistem tersebut juga belum ia terima penjelasannya. “Kita ketahui bersama SDM di tiap-tipa desa masih banyak yang memiliki kekurangan. Apalagi ditambah tidak ada pelatihan maupun pendidikan terlebih dahulu. Tentu ini merupakan hal yang aneh, tapi nyata. Mumpung masih awal tahun, kami harap persoalan ini segera diselesaikan,” ketusnya. (sumber: <http://www.harapanrakyat.com/2017/01/>

aplikasi-sistem-keuangan- desa-di-pangandaran-menuai-masalah/
diakses pada 8 Agustus 2017, pukul 23:55)

Selain masalah sumber daya manusia dan kendala dalam memasukan data, terdapat juga masalah lain yakni pada masalah laporan desa yang harus mengacu pada desa lain yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di tiap-tiap desanya. Hal ini juga di nilai menghambat pencairan dana desa, karena ketika laporan keuangan terlambat atau belum di laporkan maka dana desa tidak akan cair. Sistem keuangan desa memang dinilai efektif namun cukup menyulitkan, juga dalam hal ini minim pelatihan mengenai Sistem Keuangan Desa ini.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dimuat dalam salah satu harian yang menegaskan bahwa menurut Nursalim perangkat desa di Buton Utara menyatakan bahwa pemakaian aplikasi sistem keuangan desa terkesan dipaksakan karena kurangnya pelatihan dan pendampingan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Pelaporan tiap-tiap desa harus mengacu kepada desa yang telah diterima laporannya terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten. (Sumber: [:http://desalestari.com/2016/08/30/wajib-pakai-aplikasi-yang-seharusnya-mudah-jadi-merepotkan/](http://desalestari.com/2016/08/30/wajib-pakai-aplikasi-yang-seharusnya-mudah-jadi-merepotkan/), diakses pada 9 agustus 2017 pukul 00:11)

Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Gedong Tataan terdapat delapan belas desa, namun hanya terdapat beberapa desa yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini. Salah satunya adalah Desa Bogorejo, Desa Bogorejo telah menerapkan sistem ini sejak 2016, dan merupakan desa pertama yang menerapkan sistem ini di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Noviyati selaku Pelaku Pemberdayaan Masyarakat yang dimuat di forumdesa.com :

“Tinggal saja kemauan Aparatur Desa mau atau tidak belajar untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk menguatkan argumennya Novi memberi contoh Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sejak tahun 2016 desa Bogorejo adalah satu-satunya desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES dan sudah *update* ke BPKP di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Semua bisa dilaksanakan tinggal aparatur desanya komit dan mau belajar atau tidak, jika mereka komit untuk menegakkan transparansi anggaran APBDes di desanya dan mau belajar maka semua akan mudah dilaksanakan” (sumber : <http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html> diakses pada 1 Oktober pukul 19.05)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini menurut Sekertaris Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Widodo Sunu, berdasarkan hasil *pra riset* telah diterapkan SISKEUDES di Desa Bogorejo sejak 2016 lalu namun baru turun surat pemberitahuan dari kecamatan setelah hampir setahun Desa Bogorejo menerapkan SISKEUDES ini, dan desa Bogorejo merupakan desa pertama di Kecamatan Gedong Tataan yang menerapkan SISKEUDES ini.

Berdasarkan hasil *pra-riset*, menurut Sekeretaris Desa Bogorejo Widodo Sunu, sudah ada pelatihan-pelatihan dalam menjalankan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan yang mengelola atau mengendalikan sistem keuangan desa ini adalah sekertaris desa dibantu oleh bendahara desa, namun dalam hal pelaporan tetap kembali kepada sekertaris desa. Desa Bogorejo sendiri telah menggunakan versi yang paling terbaru dan yakni versi lima. Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan siskeudes ini memang tidak ada kendala yang berarti terkait penerapan SIKSEUDES

ini, namun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi ini. Telah *update* ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam akuntabilitas keuangan desa, peneliti juga akan melihat terdapat kemajuan yang signifikan atau tidak dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, terdapat perbedaan setelah dan sebelum menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini, dengan melihat beberapa variabel-variabel seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Nur Aziza	2014	Thesis	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Dalam Penyusunan Informasi Keuangan Daerah (Ikd) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Lampung Utara
2	Silvia Novita Siregar	2015	Skripsi	Implementasi Electronic Government Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
3	Devi Retnowati	2016	Skripsi	Persepsi Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)
4	Elisabeth Siringo Ringo	2017	Skripsi	Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Diolah oleh peneliti. 2017

Peneliti pertama fokus penelitiannya mengkaji pada evaluasi penerapan SIPKD dalam penyusunan IKD dengan menggunakan pendekatan Evaluasi Stecher, Brian M&W Alan Davis. Peneliti kedua berfokus pada proses implementasi e-government secara keseluruhan dengan konsep Van Metter dan Van Horn. Penelitian ketiga juga mengkaji dari sisi pemerintah desa dalam menerapkan UU Desa No 6 Tahun 2014 secara keseluruhan. Penelitian keempat ini yang membedakan dalam penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh sebelum adanya acuan laporan keuangan desa. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji implementasi

aplikasi sistem keuangan desa dengan konsep George C Edward dengan melihat beberapa variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang implementasi implementasi aplikasi sistem keuangan desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*).

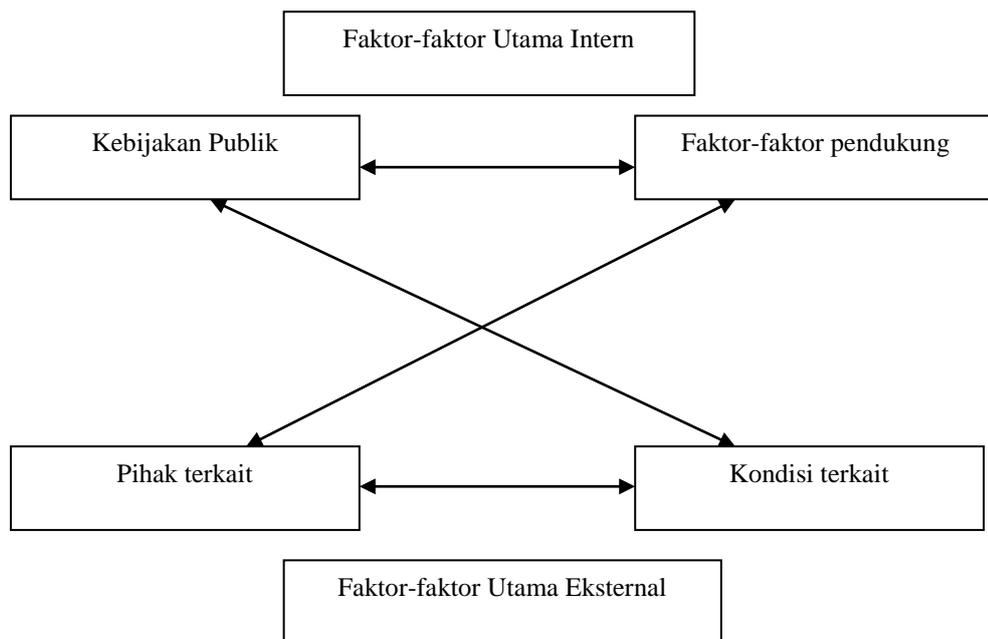
Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya.

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson dalam Hariyoso (2002:143) esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran. Sedangkan Griendle dalam Hariyoso (2002:148)

mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif.

Zainal Abidin dalam Mulyadi (2015:26) menyatakan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Gambar 1: Faktor Utama Implementasi Kebijakan



Sumber : Zainal Abidin dalam Mulyadi(2015:26)

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu,

keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks, untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model

yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain:

a. Model Merilee S. Grindlee

Keberhasilan implementasi menurut *Merilee S. Grindle* dalam Mulyono (2015: 66) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi Kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program;
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*) mencakup:

1. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

b. Model George C. Edward III

Selanjutnya *George C. Edward III* dalam Mulyono (2015:68)

Mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni Komunikasi (*Communications*),

Sumber Daya (*Resources*), Disposisi atau Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan saran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok, sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkan. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula, agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, Kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program, untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Ketidakkampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputusan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung

seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi, tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat Kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan

maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Di samping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif

bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

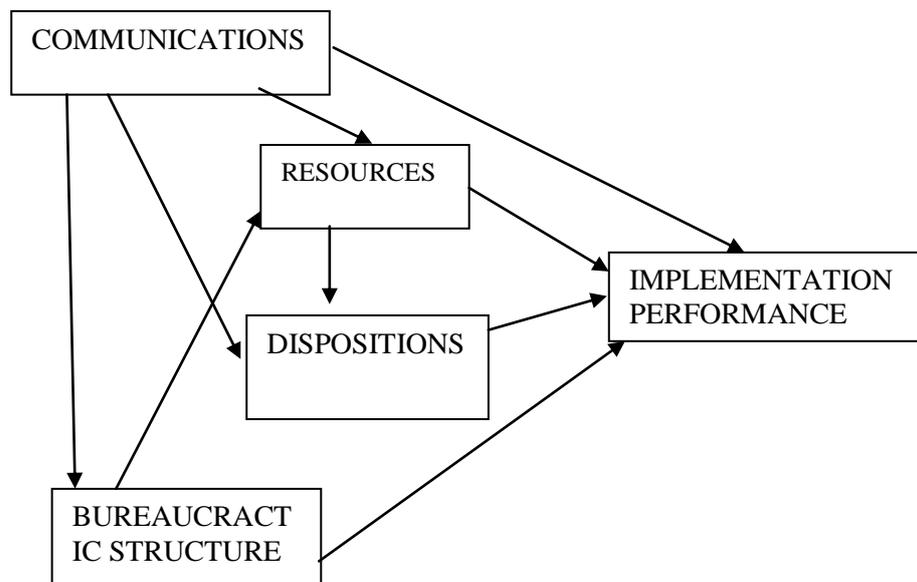
4) Struktur Birokasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *ted-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

Gambar 2 : George Edwars III 1980



Sumber : Mulyono (2015:69)

c. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model ini sering disebut sebagai *A Model of the policy Implementation process* (Model Implementasi Kebijakan). Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.

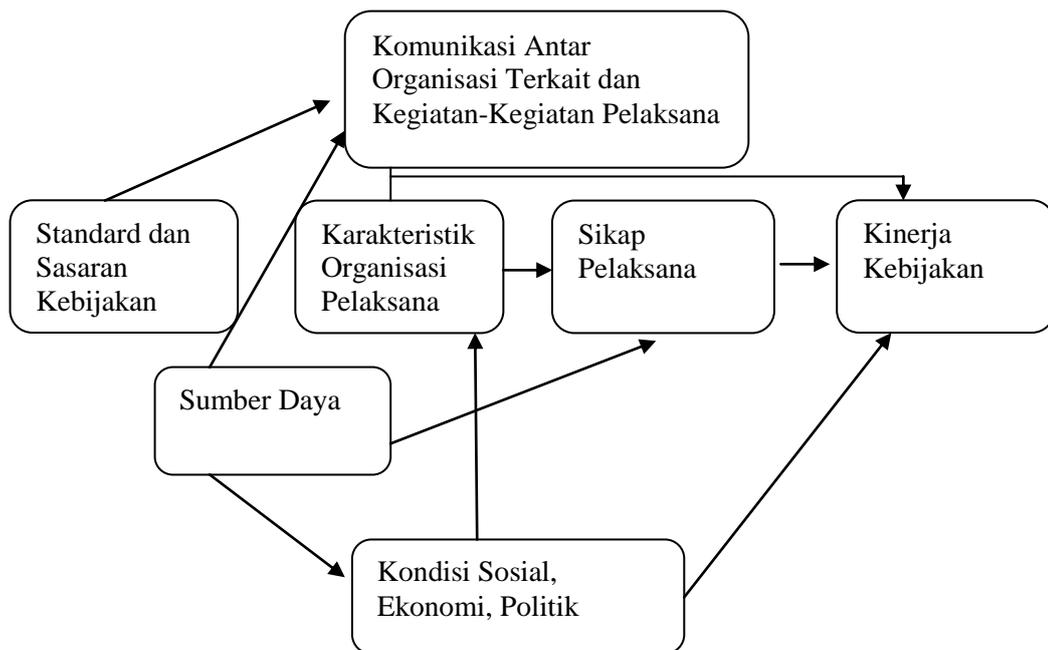
Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*Performance*). Kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Van Meter and Van Horn, the expectation of analysing the implementation of a 'top'- level policy decision and then asking (Van Meter dan Van Horn, untuk menganalisis implementasi keputusan kebijakan tingkat atas, yakni) :

- a. *To what extent were the actions of implementing officials and target* (Sampai sejauh mana tindakan para pelaksana pejabat dan target implementasi)
- b. *Groups consistent with ... that policy decision?* (Kelompok yang konsisten dengan keputusan kebijakan)

- c. *To what extent were the objectives attained over time, i.e. to what extent were the impacts consistent with the objectives?* (Sampai sejauh mana tujuan dicapai dari waktu ke waktu, yaitu sejauh mana dampaknya sesuai dengan tujuan?)
- d. *What were the principal factors affecting policy outputs and impacts, both those relevant to the official policy as well as other politically significant ones?* (Apa faktor utama yang mempengaruhi hasil dan dampak kebijakan, baik yang relevan dengan kebijakan resmi maupun kebijakan politik lainnya?)
- e. *How was the policy reformulated over time on the basis of experience?* (Bagaimana kebijakan dirumuskan ulang dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman?) (Hill and Hupe, 2002:49)

Gambar 3: Model Van Meter dan Varn Horn



Sumber : Mulyono (2015 :73)

d. Model Implementasi menurut Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn

Model ini kerap kali oleh para ahli disebut sebagai *the top down approach*. Pada model ini menjabarkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Wahab (2016:96) mengklasifikasikan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung, hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Model ini disebut juga dengan *A Frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Wahab (2016:81) mengklasifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan.
- 2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya.
- 3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Beberapa ahli menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

B. Tinjauan Mengenai Desa

Desa menurut Kansil (1983: 80) adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan suatu pemerintahan sendiri. Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam Nyoman Beratha (1982: 26-27) adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada dalam daerah kabupaten

C. Tinjauan Mengenai Sistem Keuangan Desa

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:

- 1) Laporan ke Bupati/Walikota:
 - a) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)
 - b) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan)
 - c) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan
 - d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan
 - e) Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)
- 2) Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan).

1. Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelola keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan :
 1. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah
 2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
- b. Ruang Lingkup :
Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya.

Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:

1. Tingkat Pemerintahan:
 - a. Pemerintah Pusat:
 - 1) Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.
 - 2) Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian
 - 3) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.
 - b. Pemerintah Provinsi:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan
 - 2) Fasilitasi pendampingan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - 1) Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah
 - 2) SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD))
 - 3) Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Pemerintah Desa:
 - 1) SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 2) Sarana dan Prasarana Desa
 - 3) Kebijakan tingkat Desa

2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Perencanaan:
 - 1) Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT.
 - 3) Kualitas RKP Desa
- b. Penganggaran:
 - 1) Penyusunan APB Desa
 - 2) Harmonisasi Kepala Desa & BPD
 - 3) Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan
- c. Pelaksanaan:
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa
 - 2) Kewajiban Perpajakan
 - 3) Kewenangan Kepala Desa yang besar
- d. Penatausahaan
 - 1) Administrasi pembukuan
 - 2) Cara peng-SPJ-an
 - 3) Pencatatan kekayaan desa
 - 4) Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:
 - 1) Jumlah Laporan yang harus dibuat
 - 2) Standar Pelaporan
- f. Pengawasan:
 1. Efektifitas pengawasan
 2. Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota

3. Fitur-Fitur Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan:
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan:
- g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register

4. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

- Siklus Penganggaran
 - 1) RAB
 - 2) APBDES
- Siklus Penatausahaan
 - 1) Tingkat PPTK agar menyusun Buku Pembantu Kegiatan
 - 2) Tingkat Bendahara agar menyusun
 - Buku Kas Tunai
 - Buku Bank
 - Buku Bantu Pajak
- Siklus Pelaporan

Tingkat Kepala Desa agar menyusun:

 - Laporan Realisasi anggaran
 - Laporan Kekayaan Milik Desa

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh

Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Prinsip akuntabilitas tersebut dapat diterapkan, namun diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikian, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut.

Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa ini.

D. Kerangka Pikir

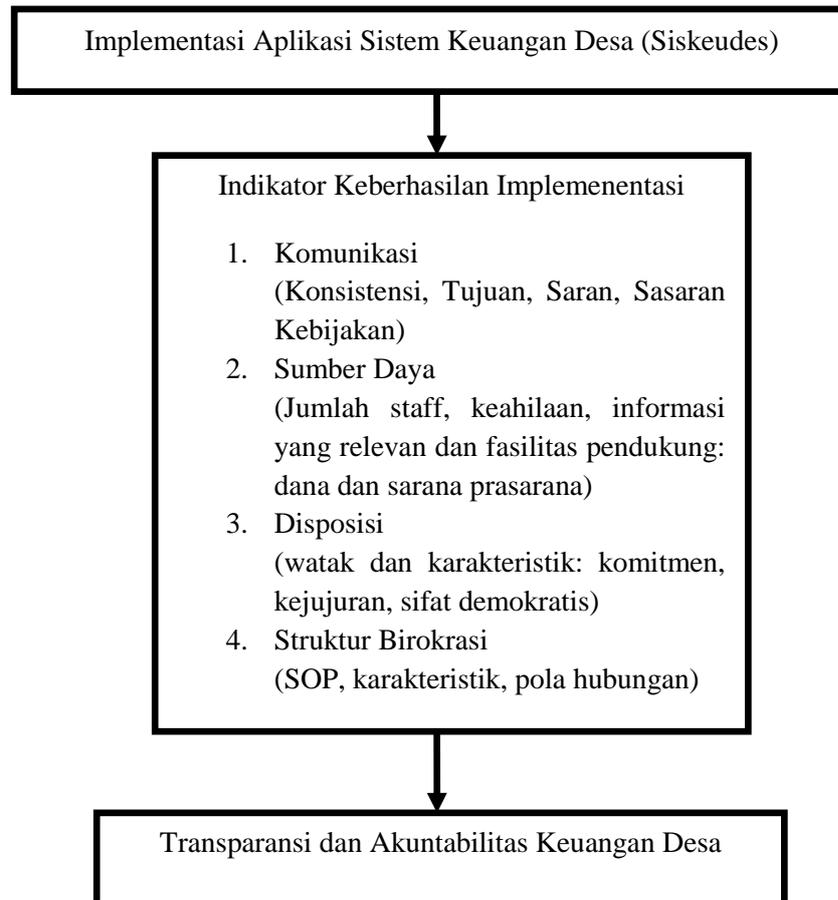
Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Keuangan desa merupakan hal yang riskan, maka dengan itu pemerintah dalam mengantisipasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2104 Tentang

keuangan desa. Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah menerapkan aplikasi ini dan menggunakan versi yang paling terbaru dan merupakan desa pertama di kecamatan Gedong Tataan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini peneliti mencoba menganalisis fenomena yang ada di Desa Bogorejo dengan menggunakan model implementasi George C Edward III, dikarenakan keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Desa Bogorejo Kecamatan Godong Tataan Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya gambar kerangka fikir dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 4 : Kerangka Pikir



III.METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik penarikan keabsahan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam politik dan pemerintahan.

Secara umum menurut Raco (2010:5). metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis. Dikaitkan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, aksesibilitas terhadap tempat dan data.

Penelitian menurut Sekaran dalam Raco (2010:5) adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya penelitian adalah pemberian

masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat sebuah keputusan.

Neuman (2014:48), *In qualitative approaches to research, analysis begin while gathering data, but such analysis tend to be tentative and incomplete. To analyze, we connect particular data to concept, advance generalizations, and identify broads trend or themes.* (Pendekatan kualitatif untuk penelitian, analisis dimulai saat mengumpulkan data, namun analisis semacam itu cenderung bersifat tentatif dan tidak lengkap. Untuk menganalisis, kami menghubungkan data tertentu dengan konsep, memajukan generalisasi, dan mengidentifikasi tren atau tema.)

A. Tipe Penelitian

Untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Fuad dan Nugroho (2014:54) yakni suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Penelitian kualitatif didefinisikan Ghony dan Almanshur (2016:25) merupakan penelitian yang menekan pada *quality* (kualitas) atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pengembangan konsep teori.

Deskriptif menurut Danandjaja (2012:29) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, penelitian ini sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancarakan. Alasan yang kedua, permasalahan ini untuk mengetahui sudah berjalan dengan maksimal implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang merupakan hal baru dan wajib diterapkan di tiap-tiap desa ini, maka hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, (2014:93) dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penulis adalah bagaimana implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini, kendala-kendala yang terjadi pada proses penerapan serta kelebihan dan kekurangan aplikasi sistem keuangan desa.

Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model implementasi George C Edward III, karena keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Desa Bogorejo sebagai berikut:

1. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi dan Pelatihan-Pelatihan
 - b. Komunikasi berdasarkan dengan tujuan siskeudes yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasam
2. Sumber-Daya:
 - a. SDM (Sumber Daya Manusia)
 - b. Fasilitas yang disediakan (Sarana-prasarana)

3. Disposisi (kecenderungan) pelaksana, meliputi:
 - a. Semangat dan kemauan pelaksana terhadap implementasi kebijakan Aplikasi sistem keuangan desa terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa di Desa Bogorejo.
 - b. Keterbukaan dan Akuntabilitas
4. Struktur Birokrasi Pendamping Desa.
 - a. SOP (*Standar Operating Prosedures*)
 - b. Waktu Pengerjaan Siskeudes

C. Informan

Informan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel. Sampel menurut Fathoni (2011:101) contoh yang terpilih untuk dihadapi sebagai objek sasaran penelitian yang hasil atau kesimpulannya dapat mewakili seluruh populasi sasaran representative. Alasan peneliti memilih dalam penentuan informan menggunakan metode pengambilan sampel adalah peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih merupakan sebagai aktor dan kelompok sasaran dari Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini, Sehingga menurut peneliti metode pengambilan sampel sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Tabel 2: Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Syafik. AR	Kasi Pemerintahan Desa
2.	Hermasyah	Kepala Desa Bogorejo
3.	Widodo Sunu	Sekretaris Desa Bogorejo
4.	Nyoman Purnomo	Kepala Urusan Keuangan Desa Bogorejo
5.	Sugiono	Kepala Urusan Perencanaan Desa Bogorejo
6.	Parno	Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo

Sumber: diolah oleh peneliti

Alasan peneliti fokus pada Perangkat Desa yang karena perangkat desa yang menjalankan dan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini dan Pemerintah Kecamatan selaku perwakilan pemerintah yang memiliki pengetahuan mengenai aplikasi sistem keuangan desa ini serta dan Badan Permusyawaratan Desa selaku pemerintah desa yang juga memiliki pengetahuan terkait aplikasi sistem keuangan desa ini.

D. Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Menurut Neuman (2014:48) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber, seperti Perangkat Desa Bogorejo, Badan Pemusyawaratan Desa Bogorejo, dan Pemerintah Kecamatan Bogorejo.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal, data sekunder penelitian ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta Pemandagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa artikel terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah

penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang *valid* dan *representatif* untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara

Wawancara menurut Burhan (2011:100) dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi

Metode wawancara menurut Irawan dalam Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan suatu alat pengumpulan dara yang digunakan dalam instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, wawancara merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan (responden).wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*).

Ada tiga jenis wawancara menurut Ghony dan Almanshur (2016:176).
yaitu :

- a. Wawancara terstruktur
Jenis wawancara ini kerap kali disebut sebagai suatu wawancara “terfokus”.
- b. Wawancara tak terstruktur,
Wawancara ini mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu indormasi dari

semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri informan.

c. Wawancara terbuka terstandar

Teknik pengumpulan data wawancara terbuka ini penerapannya pada evaluasi program.

Peneliti menyusun poin-poin pokok yang akan ditanyakan kepada narasumber agar dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa ini sudah berjalan dengan maksimal atau belum, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

2. Observasi

Observasi menurut Fathoni (2011:104) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*).

Terdapat tiga jenis observasi menurut Widi (2010:237), yakni :

1. Observasi partisipan (*participant observation*)
2. Observasi non-partisipan (*non-participant observation*)
3. Observasi terhadap objek

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi menurut Fathoni (2011:104), yaitu:

- a) Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana
- b) Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengandalkan kekuatan daya ingat.
- c) Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara rinci.
- d) Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.

Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni pada proses penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini, selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Sumber data pada penelitian ini yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

F. Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto (dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. Editing Data

Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240) editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan,

data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD.

Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240), pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan

fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Ghony dan Almanshur (2016: 246) dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

Sugiyono dalam Ghony dan Almanshur (2016:308) menjelaskan bahwa dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah terletak pada temuan, oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dilihat aneh, asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan titik perhatian dalam melakukan reduksi data.

Peneliti mengumpulkan data implementasi aplikasi sistem keuangan desa ini (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Penyajian data menurut Ghony dan Almanshur (2016:308) merupakan sekumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah

melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Menurut Ghony dan Almanshur (2016: 309) proses yang terakhir ini, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang berkompoten akan mampu menangani kesimpulan tersebut secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Selain itu menurut Ghony dan Almanshur (2016:313) bahwa pemeriksaan keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa-apa yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang disangkakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitain kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. *Denzin in Patton (2015:95) has indentified four basic type of triangulation* (mengidentifikasi empat tipe dasar dari triangulasi) :

1. *Data triangulation, the use of a variety of data sources in a study* (triangulasi data menggunakan sumber data dalam suatu penelitian),
2. *Investigation triangulation, the use pf several different researchers or evaluations* (pemeriksaan triangulasi, menggunakan beberapa peneliti atau evaluasi yang berbeda),
3. *Theory triangulation, the use of multiple perspectives to interpret a single set of data, and* (triangulasi teori, menggunakan beberapa perspektif untuk menafsirkan suatu data),

4. *Methodological triangulation, the use of multiple methods to study a single problem or program* (triangulasi metodologi, menggunakan beberapa metode untuk mempelajari suatu masalah atau)

Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Bogorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Desa Bogorejo adalah 80 Ha Pemukiman Umum, 0,16 Ha Perkantoran, 3,6 Ha Sekolah, 0,3 Ha Tempat Peribadatan, 2,5 Ha Makam, 6 Ha Jalan, dan 132 Ha lain-lain.

Desa Bogorejo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Sungai/Sukaraja
2. Sebelah Selatan : Tahura Wan Abdul Rahman
3. Sebelah Barat : Sungai/Sukadadi/Gedong Tataan
4. Sebelah Timur : Sungai/Sukaraja/PTPN/Kebagusan

Jarak Desa Bogorejo ke Ibukota Kecamatan 4 km sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten Pesawaran 3 km dan jarak Desa Bogorejo ke Ibukota Provinsi 30 km dimana ini diukur dengan menggunakan alat transport yang digunakan masyarakat umum di Desa/Kelurahan bersangkutan. Sedangkan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan $\frac{3}{4}$ jam, $\frac{3}{4}$ jam waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten dan $\frac{1}{2}$ jam ke Ibukota Provinsi.

B. Sejarah Singkat Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Desa Bogorejo pada mulanya merupakan sebuah Dusun dari beberapa Dusun yang terdapat didalam desa di Gedong Tataan. Desa Bogorejo menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri menjadi sebuah desa. Selanjutnya keinginan masyarakat tersebut ditampung dan dibahas oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam suatu rapat dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Kemudian setelah semua sepakat menjadi suatu tekad, hal tersebut disampaikan pada saat rapat desa di Gedong Tataan. Setelah disetujui oleh LMD Desa Gedong Tataan, kemudian diteruskan ke Kabupaten melalui Camat Gedong Tataan.

Pada tanggal 26 Maret 1987, Dusun Bogorejo disetujui untuk menjadi Desa Persiapan dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/082/B.III/HK/1987, dan sebagai Pjs.Kepala Desa adalah M.Suradi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Gedong Tataan. Akhirnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/272/B.III/HK/1991 tanggal: 12 Juli 1991 Desa Persiapan Bogorejo disahkan menjadi Desa Definitif dengan Pjs Kepala Desa Bapak M. Suradi.

C. Monografi Desa Bogorejo

1. Geografi

- a. Tanah Pekarangan : 462 Ha
- b. Tanah Sawah : 65 Ha
- c. Tanah Tegalan : 810 Ha
- d. Tanah Perkebunan PTP : 479 Ha
- e. Hutan Negara/Lindung : 1.500 Ha
- f. Lain-lain seluas : 16 Ha

2. Jumlah Penduduk

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 1370 KK
- b. Jumlah Jiwa : 4668 Jiwa
 - 1. Laki-laki : 2362 Jiwa
 - 2. Perempuan : 2306 Jiwa

3. Kondisi Sosial

- a. Kesehatan
 - 1. Data usia subur dan peserta KB aktif adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan usia subur di bawah 20 tahun : 42 orang
 - b. Pasangan usia subur 20 – 29 tahun : 506 orang
 - c. Pasangan usia subur 30 – 40 tahun : 295 orang
 - d. Pasangan KB aktif : 671 orang
 - 2. Selain poskesdes yang di kelola oleh bidan desa, Desa Bogorejo juga mempunyai :
Posyandu 4 Buah (Untuk ibu dan balita), yaitu :
 - 1. Posyandu Mawar
 - 2. Posyandu Dahlia
 - 3. Posyandu Melati
 - 4. Posyandu AnggrekPosbindu 1 Buah (Untuk lansia)

b. Kesejahteraan Sosial

1. Status sosial

a.	Jumlah keluarga pra sejahtera	795 KK
b.	Jumlah keluarga sejahtera I	289 KK
c.	Jumlah keluarga sejahtera II	151 KK
d.	Jumlah keluarga sejahtera III	135 KK

2. Sarana pendidikan

a.	PAUD	: 2 Buah
b.	TK	: 1 Buah
c.	SD	: 3 Buah
d.	SMP	: 1 Buah

3. Sarana ibadah

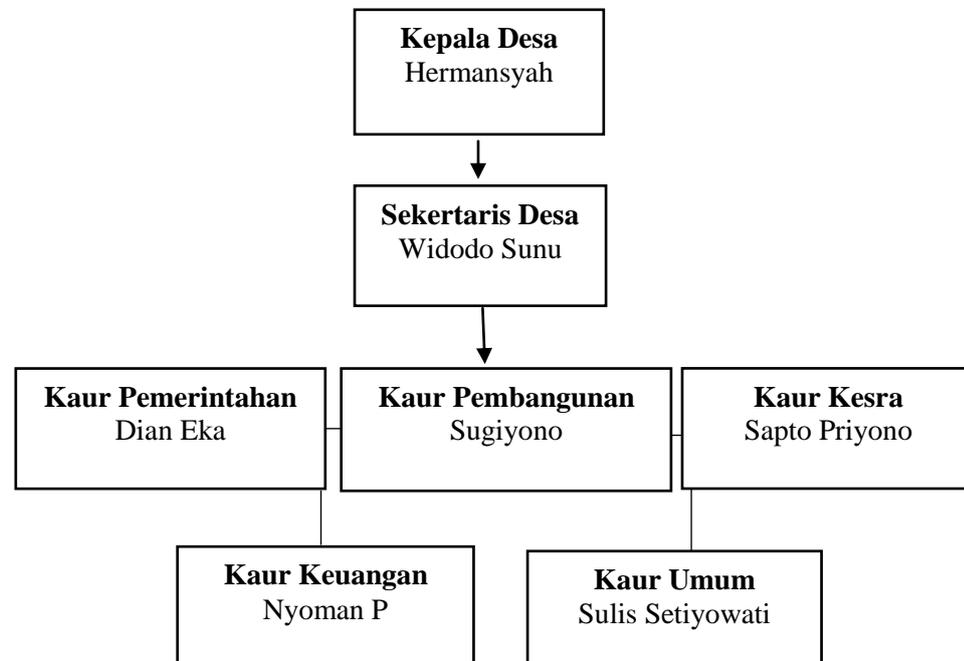
a.	Masjid	: 8 Buah
b.	Musholla	: 5 Buah

4. Kesenian dan kebudayaan

a.	Hadroh	1 Grup
b.	Mawalan	6 Grup
c.	Kuda kepang	1 Grup
d.	Sanggar tari	1 Buah

D. Struktur Pemerintahan

1. Struktur Desa Bogorejo pada tahun 2017 terdiri dari :
Gambar 6. Struktur Birokrasi



Sumber : Monografi Desa Bogorejo

2. Daftar Kepala Dusun Desa Bogorejo
 - a. Kepala Dusun 1 : Purwanto
 - b. Kepala Dusun 2 : Radisan
 - c. Kepala Dusun 3 : Rizal
 - d. Kepala Dusun 4 : Sutiyo
 - e. Kepala Dusun 5 : Samin
 - f. Kepala Dusun 6 : Maryono
 - g. Kepala Dusun 7 : Sarmin
 - h. Kepala Dusun : Wagiman

E. Potensi Desa

1. Potensi sumber daya alam

Penggalian potensi sumber daya alam Desa Bogorejo akan lebih dapat dimaksimalkan melalui program peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat lebih cerdas mengelola dan meningkatkan hasil serta

bisa membaca peluang-peluang usaha yang ada. Hal ini tentunya juga tak lepas dari peran pemerintah desa untuk memfasilitasi, membina dan mendampingi melalui program desa.

2. Potensi wisata

1. Air terjun yang belum di kelola

Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat 2 lokasi wisata air terjun yang masih alami dan belum dikelola oleh pemerintah desa

2. Bumi perkemahan

Bumi perkemahan adalah tempat yang digunakan untuk acara-acara pramuka, Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mempunyai tempat untuk perkemahan yang sudah dikelola oleh pemerintah desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan model implementasi Goerge C Edwards sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa pada indikator pertama yakni komunikasi yang menjadi ukuran keberhasilan adalah transmisi dan kejelasan informasi belum maksimal dikarenakan kurang maksimalnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP.
2. Sumber daya baik dari segi sumber daya manusia di desa Bogorejo berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana sudah baik ditandai dengan adanya tim PTKD yang membantu pengoperasian siskeudes ini. Sarana dan prasarana yang menunjang telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa.
3. Disposisi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap program siskeudes sudah paham serta keterbukaan terkait keuangan desa lebih baik, selain itu semangat dan kemauan para perangkat desa sudah baik dikarenakan siskeudes di anggap sangat memudahkan dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.

4. Struktur birokrasi ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian tugas, desa ada tingkatan user, kabupaten admin, user melaporkan ke admin baru ke tingkat pusat. Untuk stuktur birokrasi desa ada tim PTKD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemampuan atau skill operator dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi.
2. Setiap desa sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih maksimal.
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebaiknya menindak tegas desa yang masih menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang bukan aplikasi resmi keluaran dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar aplikasi yang digunakan keseluruhan desa memiliki kesamarataan dan laporan keuangan desa tidak dapat dimanipulasi
4. Desa sebaiknya mengikutsertakan masyatakat mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa.

5. BPKP sebaiknya meninjau kembali aplikasi sistem keuangan desa ini agar tidak mudah terserang virus dan sebaiknya dibuat sistem online agar semakin mempermudah para perangkat desa ketika pelaporan keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 250 halaman
- Danandjaja, 2012. *Metodologi Penelitian Sosial : Disertai Aplikasi SPSS for Windows*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 254 halaman
- Dwijowijoto, RN. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 224 halaman
- Dwiyanto, Agus.2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 274 Halaman
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta. 149 halaman
- Fuad, Anis dan Nugroho, Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 99 halaman
- Ghony, M Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta. 387 halaman
- Hill, Michael and Hupe, Peter. 2002. *Implementation Public Polic*. Thousand Claks, . California. 231 halaman
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media, Jakarta. 225 halaman

- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. 341 halaman
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung. 258 halaman
- Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 325 halaman
- Neuman, W Laurence. 2014. *Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approach 7th Edition*. British Library Cataloguing-in Publication Data: United State of America
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition*. Library of Congres Catalogue-in Publication Data: United Stated of America. 340 halaman
- Raco, J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. PT Grasindo, Cikarang. 234 halaman
- Singrimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES, Yogyakarta. 265 Halaman
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Ombak Dua, Yogyakarta. 237 Halaman
- Syamsudin, Ardian. 1980. *Proses penetapan Kebijaksanaan: Edisi Kedua*. Penerbit Erlangga, Jakarta. 156 halaman
- Wahab. Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: . Jakarta. 259 halaman
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 87 halaman
- Widi, restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penlitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah pelaksanaan Penlitian*. PT Graha ilmu: Yogyakarta.

Jurnal:

- Hanifah dan Praptoyo. 2015. *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*
- Rahmawati dkk. 2015. *Jurnal Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Lain:

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
diakses pada 5 Agustus 2017 Pukul 22.54

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp> diakses pada 5 Agustus 2017 Pukul 21.35

Dua Jurai <http://duajurai.co/2016/08/03/mudahkan-aparat-pemerintah-desakelola-keuangan-bpkp-lampung-buat-aplikasi-siskeudes/> diakses pada 8 Agustus 2017 Pukul 13:16

Forum Desa <http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html> diakses pada 8 Agustus 2017 Pukul 14:25

Lampung Sai <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/mesuji/ta-2017-pemkab-mesuji-akan-terapkan-aplikasi-sistem-keuangan-keseluruhdesa/> diakses pada 9 Agustus 00:43

Lampung 1.com <http://www.lampung1.com/2016/05/dendi-buka-pelatihan-siskeudes-bagi-aparatur-pemdes-se-pesawaran/> diakses pada 15 Januari 2018 Pukul 13.59

OkezoneFinance

<http://economy.okezone.com/read/2017/05/18/320/1694622/aduh-baru-33-desa-yang-gunakan-sistem-keuangan-berbasis-teknologi>
diakses pada 5 Agustus 2017 Pukul 02:45

Pesawarankab.go.id <http://www.pesawarankab.go.id/informasi-140-siskeudes-wujudkan-pengelolaan-keuangan-desa-yang-transparan-akuntabel-dan-partisipatif.html> diakses pada 8 Agustus Pukul 15:40

Suara Merdeka <http://berita.suaramerdeka.com/sistem-keuangan-desa-online-diberlakukan-2017/> diakses pada 8 Agustus Pukul 13:45